



EDISI SENIN 06 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
Mendikdasmen: MBG Hanya untuk Siswa
Membutuhkan

05

NUSANTARA
6 Hari Bara Sampah Jatiwaringin Belum Padam,
Jerat Hukum Menanti Pengelola

10

LISTSTYLE
Strategi Fashion Interview
Perhatikan Outfit dan Psikologi Warna

MEMBIDIK TIKUS-TIKUS KANTOR POS

G onjang-ganjang menerpa BUMN tertua di Tanah Air, PT Pos Indonesia (Persero). Ulah nakal para pegawainya ditaksir membuat perusahaan menelan kerugian sedikitnya Rp37,72 miliar sepanjang semester pertama 2025. Kebocoran dana paling masif terendus di Regional 6 Makassar dengan angka mencapai Rp18,71 miliar, disusul wilayah Medan dan Bandung. Kini, aroma tak sedap dari dugaan rekayasa keuangan tersebut memicu lembaga Danantara turun tangan melakukan audit menyeluruh. Di tengah pusaran skandal itu, sang Direktur Utama, Daud Joseph memilih mundur. Borok di tubuh PT Pos Indonesia menambah panjang daftar karut-marut tata kelola korporasi pelat merah. Catatan kelam dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan betapa akutnya epidemi ini, dengan sedikitnya 364 kasus korupsi terjadi di lingkungan BUMN sepanjang 2016 hingga 2024. Gurita rasuah tersebut telah menyeret 888 tersangka ke meja hijau dan memicu potensi kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp279,9 triliun. Rentetan skandal dari masa ke masa inilah yang mempertegas urgensi rencana radikal pemerintah untuk merampingkan portofolio korporasi negara. Dari sejarah masa lalu yang sempat menggempuk hingga lebih dari 700 entitas termasuk anak-cucu usaha, pemerintah kini bergerak agresif memangkas jumlah BUMN melalui skema holding dan likuidasi. Target akhirnya sangat ambisius, yaitu menyapu bersih inefisiensi dan menyisakan hanya sekitar 30-an BUMN inti. Apakah perusahaan negara benar-benar akan sehat? Atau sekadar mengurangi jumlah tanpa menumpas akar masalah? BACA HAL 11...

Peta Kerugian

di Berbagai Lini Daerah

Praktik kecurangan ini tersebar di berbagai wilayah operasional perseroan sepanjang semester I-2025:



Regional 6 Makassar:

Rp 18,71 Miliar

Regional 1 Medan

Rp 18,71 Miliar

Regional 3 Bandung

Rp 5,69 miliar.Regional 2 Jakarta, Regional 4 Semarang,
Regional 5 Surabaya, dan Regional Head Office**Rp 4 miliar.**

**Kebocoran
dana ini juga
merembet ke
entitas anak
perusahaan:**



PT Pos Logistik Indonesia

Rp433,8 juta

PT Pos Finansial Indonesia

Rp216,58 juta.

MENDIKDASMEN: MBG HANYA UNTUK SISWA MEMBUTUHKAN

Pemerintah memutuskan untuk mengubah skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dipastikan tidak akan diberikan kepada seluruh siswa, melainkan diprioritaskan secara selektif bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan, keputusan mengenai pembatasan sasaran penerima manfaat tersebut

PUSARAN KASUS KORUPSI PROGRAM MBG

Daftar 7 Tersangka Utama



Dadan Hindayana (Eks Kepala Badan Gizi Nasional/BGN)



Sony Sonjaya (Eks Wakil Kepala BGN)



Lodewyk Pusung (Eks Wakil Kepala BGN)



Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardani (Eks Karo Hukum & Humas/Sekdep BGN)



Asep Yusuf Somantri / AYS (Kaki tangan Sony Sonjaya)



Andri Mulyono (Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal / PT YAT)



Glory Harimas Sihombing (Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review)

(Catatan: Kasus ini juga menyeret seorang perwira TNI, Kolonel BU)

Modus Operandi Jajaran Petinggi BGN

Bancakan Proyek Wadah Makanan (Ompreng): Mendirikan perusahaan fiktif untuk memonopoli penjualan wadah makanan (ompreng) dengan harga sepihak.

Manipulasi Titik Pelayanan: Menyetujui titik pelayanan SPPG secara tidak semestinya.

Pelanggaran Kontrak & Mark-up: Pengadaan logistik dilakukan tanpa memenuhi syarat kontrak dan disertai penggelembungan harga



UTUSAN Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menyatakan tidak akan menghentikan program ini meskipun saat ini tengah menghadapi sejumlah kendala teknis dan persoalan hukum di lapangan.

Menurut Hashim, keberlanjutan



Sejumlah siswa membawa ompreng MBG di kompleks MIN 11 Aceh Barat dan MTS Harapan Bangsa Desa Kuta Padang, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Rabu (20/5/2026).ant

telah disepakati dalam rapat tingkat menteri. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan formulasi teknisnya di lapangan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

"Yang sudah diputuskan dalam rapat tingkat menteri adalah penerima

MBG ini nanti tidak untuk semuanya, tetapi hanya untuk yang memerlukan," ujar Abdul Mu'ti di Yogyakarta, Minggu (5/7/2026).

Menurut Mu'ti, langkah penajaman sasaran ini diambil agar program lebih berkeadilan dan

anggaran negara dialokasikan secara efektif.

"Jadi memang ya lebih tepat siapa yang paling berhak menerima, itu yang dilayani," katanya.

Mu'ti mengingatkan, semangat utama dari program MBG yang diusung oleh Presiden adalah untuk mengikis angka tengkes (stunting) serta membangun generasi muda yang sehat secara fisik.

Namun, di lingkungan sekolah, Kemendikdasmen juga mengintegrasikan program ini sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter siswa. Konsep tersebut dimasukkan ke dalam gerakan "Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat", khususnya pada poin pembiasaan pola makan yang sehat dan bergizi.

"Kami sudah menerbitkan berbagai panduan mengenai bagaimana pendidikan karakter terintegrasi dengan MBG," kata Mu'ti. Saat ini, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sembari menunggu kebijakan teknis lanjutan.

Pemerintah sedang mengkaji secara mendalam skenario keterlibatan kantin sekolah dalam jalur distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencana ini diproyeksikan sebagai salah satu alternatif mekanisme pelayanan di lingkungan sekolah.

Abdul Mu'ti menjelaskan, skema pelibatan kantin tersebut saat ini masih dalam tahap penyusunan bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga kini, pemerintah belum mengetuk palu terkait keputusan akhirnya.

"Jadi belum ada keputusan soal bagaimana nanti kantin dan berbagai pelayanan lainnya. Agar MBG berjalan dengan baik, tentu semua harus melalui pengkajian yang mendalam," ujar Abdul Mu'ti di Yogyakarta, Minggu (5/7/2026).

Menurut Mu'ti, regulasi teknis dan otoritas penuh terkait pelaksanaan serta distribusi program MBG berada di bawah kewenangan BGN. Sementara itu, Kemendikdasmen berperan memberikan masukan dari perspektif kebutuhan serta kesiapan ekosistem sekolah di lapangan.

"Mekanismenya bagaimana, sedang kami susun supaya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik. Bagaimana nanti kebijakan barunya akan disiapkan BGN sebagai institusi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan MBG," tuturnya. (tin,ist,kum/dya)

Hashim Djojohadikusumo Pastikan Program Dilanjutkan

program MBG merupakan komitmen reguler Presiden Prabowo Subianto yang sudah direncanakan sejak lama. Pemerintah menargetkan program tetap berjalan hingga seluruh kelompok sasaran menerima haknya.

"Pemerintah sudah bertekad untuk melanjutkan program MBG. Tidak akan berhenti sampai kita berhasil memberikan makanan bergizi untuk semua anak-anak dan ibu-ibu hamil yang perlu makanan bergizi," kata Hashim dalam acara pengukuhan organisasi Srikandi Jaga Desa di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Hashim menjelaskan bahwa MBG merupakan gagasan yang diusung Prabowo Subianto sejak tahun 2006. Program ini dirancang sebagai intervensi pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus menekan angka tengkes (stunting) di Indonesia. Komitmen tersebut kemudian konsisten dimasukkan ke dalam visi-misi politik Prabowo pada Pemilu 2009, 2014, 2019, hingga Pemilu 2024.

"Itu sudah ada tekad, itu janji kampanye Prabowo Subianto. Tidak akan berhenti, akan dilanjutkan," ujar Hashim.

Meskipun menegaskan program akan tetap berjalan, Hashim mengakui adanya sejumlah masalah dalam implementasi di lapangan. Ia mengonfirmasi adanya laporan mengenai tindakan penyelewengan anggaran yang berpotensi merusak tatakelola program.

"Namun, dalam perjalanan program tersebut terdapat penyelewengan, penyimpangan, bahkan ada yang merusak citra program yang mulia ini," tutur Hashim.

Selain mengevaluasi pelaksanaan MBG, Hashim memaparkan bahwa indikasi penyelewengan juga ditemukan pada program berbasis pedesaan lainnya, yaitu Koperasi Desa Merah Putih dan pengelolaan Sekolah Rakyat. Terkait temuan tersebut, ia meminta Kementerian terkait untuk memperkuat sistem pengawasan. (tin,ist/dya)

DPR-PEMERINTAH BERI SINYAL KENAIKAN BIAYA HAJI 2027



Jemaah haji Indonesia dan petugas haji 2026 saat kembali ke Tanah Air. (Dok. Humas Kemenhaj)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengingatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan mengenai adanya potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2027. Proyeksi kenaikan ini dinilai sulit dihindari akibat lonjakan harga pada sejumlah komponen utama serta dinamika makroekonomi yang terjadi di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Untuk itu, parlemen mendesak penataan ulang formula anggaran agar beban finansial tersebut tidak langsung melimpah kepada para calon jemaah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Berdasarkan perhitungan awal

mengenai pemenuhan kewajiban operasional, struktur anggaran haji ke depan diperkirakan akan mengalami penyesuaian ke atas.

"Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kita selesaikan kewajiban

penyelenggara ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik. Kemungkinan biaya haji akan meningkat. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab bersama kepada masyarakat Indonesia," ujar



Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memberikan arahan pada Malam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (4/7/2026). Dok: Humas Kemenhaj

Evaluasi 2026: Mina Jadi Titik Terlemah, Kematian Jemaah Masih Tinggi

DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah menyoroti secara tajam fasilitas fisik dan manajemen perlindungan jemaah di lapangan sepanjang musim haji 2026. Salah satu persoalan kronis yang dinilai menjadi titik paling kritis dan belum menemukan solusi permanen adalah keterbatasan kapasitas ruang serta buruknya pemenuhan standarisasi pelayanan di wilayah Mina, Arab Saudi.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa tantangan tata operasional di kawasan tersebut kian berat karena pertumbuhan kuota jemaah asal Indonesia sama sekali tidak diiringi dengan perluasan wilayah fasilitas di maktab-maktab kritis. Kondisi statis ini dinilai memicu risiko keamanan dan kenyamanan yang sangat tinggi bagi jemaah.

"Tantangan yang berat bagi kita,

Mina itu tidak pernah bertambah. Berharap bertambah kuota, tapi area (Mina) tidak pernah bertambah," tutur Marwan dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Jakarta.

Untuk meredam kepadatan yang berulang setiap musim, pihak legislatif mendesak pemerintah mengoptimalkan dan mengelola secara sistematis kapasitas operasional skema Tanazul-yakni memindahkan jemaah secara dinamis atau memulangkan mereka lebih awal dari tenda maktab. Melalui penataan Tanazul yang terukur, penumpukan masif diharapkan tidak lagi menjadi siklus masalah yang terus berulang tanpa penyelesaian di masa mendatang.

Merespons temuan tersebut, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj)

Mochamad Irfan Yusuf secara terbuka mengakui bahwa pelayanan haji di Mina menjadi titik terlemah sepanjang pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Irfan meminta jajarannya untuk membedah seluruh laporan operasional di lapangan secara gamblang tanpa ada aspek yang ditutup-tutupi.

"Kita tahu Mina menjadi salah satu titik kelemahan kita dalam pelayanan kemarin. Saya minta dievaluasi nanti kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua harus kita buka berbagai kesalahan, berbagai kekurangan kita buka selebar-lebarnya tanpa berpretensi untuk menyalahkan satu sama lain," ujar Irfan dalam pidatonya di hadapan peserta Rakernas. (tin,ist,tmo/dya)

RATA-RATA BIAYA HAJI JEMAAH REGULER PER JEMAAH

2026

■ Rp 87,40 juta

■ Rp 54,19 juta.

2025

■ Rp 89,41 juta

■ Rp 55,43 juta.

2024

■ Rp 93,41 juta

■ Rp 56,04 juta.

2023

■ Rp 90,05 juta

■ Rp 49,90 juta.

2022

■ Rp 97,79 juta

■ Rp 39,89 juta.

■ BPIH

■ biaya yang ditanggung jemaah (Bipih)

Marwan dalam paparan resminya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengakui bahwa tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pada musim haji mendatang akan jauh lebih berat. DPR menyoroti keberadaan beberapa komponen biaya yang berada di luar kendali domestik, salah satunya adalah sektor transportasi udara.

Tarif penerbangan dinilai memiliki ruang negosiasi yang sangat terbatas karena dipengaruhi oleh regulasi maskapai internasional serta fluktuasi harga bahan bakar. Meski demikian, Marwan menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI bersama kementerian terkait akan menyisir ulang seluruh pos anggaran guna mencari peluang efisiensi, terutama pada sektor pelayanan akomodasi dan logistik di Arab Saudi, tanpa harus mengorbankan kualitas standar pelayanan minimal bagi jemaah.

"Komisi VIII bersama Kementerian Haji akan mengkaji seluruh komponen biaya. Jika masih memungkinkan untuk dipertahankan, tentu akan kami upayakan," ucap Marwan menekankan komitmen parlemen.

Merespons peringatan dari pihak parlemen, Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membenarkan adanya tren kenaikan biaya tersebut. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan bahwa kalkulasi kenaikan ini dipicu oleh akumulasi beberapa faktor eksternal yang bergerak simultan, mulai dari pergerakan harga avtur dunia hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. (tin,rls kcm/dya)

KELUARGA DOKTER ICHA TUNTUT 4 ORANG DI JALUR PIDANA HINGGA SUMPAAH ADAT

Kasus dugaan intimidasi yang berujung pada kematian tragis dr. Eliza Princila Utami Pakaeononi, atau yang akrab disapa Dokter Icha, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga tidak hanya menuntut pertanggungjawaban hukum pidana positif, melainkan juga menantang para terduga pelaku untuk menghadapi hukum adat setempat melalui mekanisme sumpah adat secara terbuka di hadapan masyarakat.

Rangkaian langkah hukum resmi diambil oleh keluarga almarhumah pada Jumat, 3 Juli 2026, dengan mendatangi Polda Nusa Tenggara Timur. Laporan tersebut diajukan langsung oleh ayah kandung almarhumah, Gabriel Pakaeononi, bersama sang ibu, Nur Azizah, serta kedua adik korban, Tiara Maharani Dwi Pakaeononi dan Eveline Pakaeononi, dengan didampingi oleh kuasa hukum keluarga, Victor Manbait.

Terdapat empat orang yang dilaporkan secara resmi ke pihak berwajib, yakni tiga anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara yang terdiri dari Therensius Lazakar dari Partai Golkar, Norbertus Tubani dari PKB, dan Veronika Lake dari PDI Perjuangan. Sementara satu terlapor lainnya adalah Maria Mathildis Sau alias Thildis, seorang dokter hewan yang berstatus Aparatur Sipil Negara pada Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kuasa hukum keluarga, Victor Manbait, menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil setelah melalui proses penelusuran mendalam serta pengumpulan informasi dari berbagai pihak. "Setelah kami mendalami seluruh rangkaian peristiwa, ada empat orang yang kami laporkan secara resmi kepada Polda NTT," katanya dikutip Minggu (5/7/2026).

Lebih lanjut, Victor membeberkan keterlibatan Maria Mathildis Sau dalam peristiwa di ruang IGD Rumah Sakit Leona Kefamenanu pada 13 Juni 2026, ketika dr. Icha tengah bertugas menangani pasien darurat korban gigitan ular. Berdasarkan keterangan keluarga, oknum ASN tersebut diduga ikut melakukan tekanan psikologis



Orang tua dr Icha, Gabriel Pakaeononi dan Nur Azizah, saat menyampaikan isi hati pada hari pemakaman anaknya.Ist

dan memaksakan kehendaknya terkait pelayanan medis manusia.

Terkait tindakan tersebut, Victor mengatakan, "Yang bersangkutan juga berada di IGD dan ikut memaksakan kehendak. Bahkan

sempat mengatakan bahwa dirinya bisa mengambil serum di puskesmas dan menyuntikkannya sendiri kepada anggota keluarganya yang sakit."

Pernyataan dari dokter hewan tersebut dinilai keluarga

memperkeruh situasi di IGD, mengingat di saat yang sama dr. Icha juga menerima berbagai tekanan verbal, ucapan keras, dan intimidasi dari ketiga anggota DPRD Timor Tengah Utara yang dilaporkan.

Rangkaian intervensi kata-kata tersebut memicu trauma psikis berat pada dr. Icha hingga ia sempat dirawat di RS Leona sebelum akhirnya dilarikan ke Kota Kupang untuk mendapatkan penanganan medis kejiwaan lanjutan. Pada 24 Juni 2026, dr. Icha menjalani terapi intensif di Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Healthcare Kupang dan didiagnosis mengalami depresi berat tanpa gejala psikotik, hingga akhirnya pada Jumat, 26 Juni 2026 petang, dokter muda tersebut ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di kediaman orangtuanya di kawasan RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. (wid.istrls/dya)

Kemenkes Restui Nakes Hentikan Layanan Jika Terancam

KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia mengambil langkah hukum dan reformasi regulasi secara masif demi merespons tragedi memilukan yang menimpa almarhumah dr. Eliza Princila Utami Pakaeononi atau yang akrab disapa Dokter Icha di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah pusat kini tengah bergerak cepat dan berkomitmen penuh merancang serta me-matangkan sebuah regulasi mutakhir setingkat Peraturan Presiden.

Langkah strategis ini diambil guna memastikan adanya jaminan keamanan absolut serta keselamatan ruang kerja bagi seluruh pejuang kesehatan di garis terdepan pelayanan, sekaligus membentengi mereka secara hukum dari segala bentuk tindakan kekerasan, premanisme, hingga intimidasi psikologis maupun verbal yang dilakukan oleh oknum masyarakat saat mereka tengah bertugas.

Dalam keterangan pers

resmi yang digelar secara daring dari Jakarta, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, Yuli Farianti, mengumumkan arah kebijakan baru dan terobosan regulasi yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi oleh jajaran kementerian terkait. Yuli Farianti menguraikan secara gamblang rencana besar pemerintah pusat tersebut dengan menyatakan, "Upaya perbaikan pelayanan kesehatan ke depan yang pertama adalah pemerintah pusat telah menyusun rancangan peraturan presiden tentang perlindungan keamanan dan keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan."

Melalui pengesahan rancangan Perpres ini nantinya, pemerintah daerah di seluruh Indonesia akan memiliki kewajiban hukum yang mengikat untuk melakukan pembinaan secara proporsional, berkala, dan menyeluruh, sekaligus diberikan wewenang penuh dalam menjatuhkan sanksi administratif hingga sanksi operasional yang tegas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang kedapatan abai atau melakukan pelanggaran terkait koordinasi perlindungan keselamatan nakes.

Penyusunan regulasi yang disebut oleh pemerintah ini didasarkan secara kuat pada fakta-fakta empiris di lapangan. Kemenkes memaparkan bahwa berdasarkan hasil investigasi mendalam dan komprehensif yang dilakukan oleh tim khusus ke lokasi kejadian perkara, ditemukan tiga poin krusial yang menjadi pemantik utama evaluasi nasional ini.

Temuan utama tersebut mengungkap adanya dugaan kuat tindakan intimidasi verbal yang sangat intens oleh oknum masyarakat di ruang perawatan, sementara di sisi lain, tindakan penanganan medis kedokteran yang sempat diberikan oleh almarhumah dr. Icha kepada pasien dipastikan sudah sepenuhnya berjalan tepat dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Investigasi lapangan tersebut juga menyoroti satu kelemahan fatal, yakni masih sangat lemahnya sistem koordinasi serta proteksi perlindungan keselamatan nakes yang melibatkan jajaran manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan setempat, hingga Pemerintah Daerah. (wid.ist,kum/dya)



Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kementerian Kesehatan, dr. Yuli Farianti, menyampaikan hal itu usai menghadiri misa pemakaman dr. Icha di rumah duka di Perumahan RSS Baumata, Kabupaten Kupang, Senin (29/6/2026)

6 HARI BARA SAMPAH JATIWARINGIN BELUM PADAM, JERAT HUKUM MENANTI PENGELOLA

Asap pekat berwarna abu-abu kecokelatan masih terus membubung dari tumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Memasuki hari keenam sejak api pertama kali berkobar pada Selasa (30/6/2026) siang, penanganan di lapangan masih terus berjalan. Di balik kabut asap yang menyesak dada warga sekitar, sebuah peringatan keras telah ditiupkan dari ibu kota jika insiden ini tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja sebagai musibah alam. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah bersiap mengambil langkah hukum yang tegas.



Kebakaran yang melanda area seluas 18 hektare dari total luas TPA yang mencapai 46 hektare ini telah memaksa pemerintah menetapkan radius batas aman kualitas udara sejauh 1,7 kilometer dari lokasi kejadian. Kementerian Kesehatan pun harus turun tangan mendirikan pos medis darurat guna menangani ratusan warga yang mulai terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Memadamkan kebakaran TPA nyatanya tidak semudah menyiram kobaran api di atas gedung. Karakteristik tumpukan sampah organik yang membusuk menghasilkan gas metana di lapisan dalam, membuat perilakunya mirip dengan kebakaran lahan gambut. Api terlihat padam di permukaan, namun terus membara dan menjalar di bagian bawah.

Hingga Minggu (5/7/2026), tim gabungan dari armada pemadam kebakaran darat, BNPB, dan Manggala Agni masih berjibaku di lapangan. Helikopter water bombing dikerahkan untuk mengguyur titik-titik api yang sulit dijangkau dari udara. Sementara di darat, tim Manggala Agni terpaksa menggunakan metode inject--menyuntikkan air langsung menggunakan pipa besi ke kedalaman timbunan sampah demi memastikan bara di perut bumi Jatiwaringin.

Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, yang meninjau langsung Posko Terpadu pada Minggu petang mengonfirmasi adanya perkembangan signifikan, meski

status siaga belum diturunkan. Dari sekitar 70 persen area yang sebelumnya membara, kini titik panas aktif berhasil ditekan hingga tersisa 3,6 persen atau sekitar 1,68 hektare.

"Tadinya sekitar 70 persen daerah ini membara. Kemudian secara

bertahap, kerja keras dimatikan, diberi air dari bawah, disuntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya, maka sekarang tinggal 3,6 persen. Artinya ini suatu angka yang luar biasa," ujar Jumhur. Namun, ia buru-buru

menambahkan bahwa situasi ini masih sangat ringkih.

"Lalu ada tim Manggala Agni yang melakukan injeksi (pemadaman dari bawah). Teorinya harusnya mati, tapi kalau panas terus menerus, potensi terbakar lagi ada kalau kita tidak waspada. Mudah-mudahan sore, malam ini atau besok bisa benar-benar tuntas," lanjutnya.(gus,ist,ant/dya)

Kronologi dan Luas Lahan Terdampak

- **Waktu Kejadian:** Kebakaran bermula pada Selasa, 30 Juni 2026, sekitar pukul 12.30 WIB.
- **Luas Area Terbakar:** Api menghancurkan 15 hektar hingga 18 hektar lahan dari total luas TPA sebesar 33 hektar.
- **Penyebaran Cepat:** Lahan yang terbakar melonjak signifikan dari semula hanya 2 hektar di hari pertama akibat angin kencang dan cuaca panas ekstrem.

Penyebab Kebakaran

- **Gas Metana & Cuaca:** Kebakaran dipicu oleh akumulasi gas metana di bawah gunung sampah setinggi 20-30 meter yang dipicu oleh cuaca panas ekstrem.
- **Ketiadaan Sistem Landfill:** Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menduga titik awal api berasal dari area TPA yang belum menerapkan sistem controlled landfill.



dalam keterangan tertulisnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan teknologi WTE harus dilakukan secara transparan dan wajib memenuhi standar emisi internasional agar tidak menimbulkan masalah lingkungan baru. Di samping itu, edukasi pengurangan sampah dari sumbernya, seperti pemilahan sampah rumah tangga, penguatan bank sampah, dan daur ulang residu ekonomi, tetap harus berjalan beriringan dalam ekosistem ekonomi sirkular.(eid,ist/kum)

Momentum Menuju Waste-to-Energy

TRAGEDI Jatiwaringin yang telah melumpuhkan aktivitas warga selama enam hari ini memicu desakan kuat dari parlemen agar Indonesia segera menyudahi era penimbunan sampah konvensional.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa peristiwa ini harus dijadikan momentum untuk mempercepat program pengelolaan sampah nasional yang modern dan berkelanjutan.

Setiap tahunnya, Indonesia memproduksi sekitar 56 juta ton sampah yang sebagian besar berakhir menumpuk di TPA tanpa pengolahan. Akumulasi ini menciptakan bom waktu berupa gas metana yang siap meledak dan terbakar kapan saja saat dipicu cuaca panas atau kelalaian manusia.

Eddy menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang tengah mendorong percepatan pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik di berbagai daerah. Teknologi ini dinilai sebagai solusi strategis ganda: mereduksi volume sampah secara signifikan sekaligus menyuplai energi bersih bagi masyarakat.

"Kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi alarm bahwa kapasitas pengelolaan sampah kita sudah berada pada titik yang membutuhkan perubahan mendasar; termasuk di dalamnya adalah memproses sampah menjadi sumber daya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk menjadi energi listrik," kata Eddy Soeparno

Dana Desa Terpangkas jadi Rp138 M, Proyek Jalan di Kabupaten Malang Terancam



Kondisi salah satu ruas jalan di wilayah Dusun Turirejo, Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. (Santi/Lentera)

MALANG - Alokasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Malang terpangkas menjadi Rp 138,54 miliar pada 2026. Penyusutan anggaran tersebut berpotensi membuat sejumlah proyek pembangunan, terutama perbaikan jalan desa, tersendat. Hal ini seiring semakin terbatasnya kemampuan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Jika pembangunan fisik sementara terhambat, desa bisa mengalihkan fokusnya ke segmen pemberdayaan masyarakat," ujar Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Ira Kuswandari, dikutip pada Minggu (5/7/2026).

Dijelaskannya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, Kabupaten Malang memperoleh alokasi Dana Desa reguler sebesar Rp138,54 miliar. Angka tersebut merosot sekitar Rp321,52 miliar dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp460,06 miliar.

"Mau tidak mau penurunan anggaran itu memaksa pemerintah desa menyusun ulang skala prioritas belanja. Oleh karena itu, sejumlah

proyek fisik pun terancam tertunda karena kemampuan pembiayaan melalui APBDes yang semakin terbatas itu," ungkap Ira.

Ditegaskannya, pemerintah desa harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan di tengah keterbatasan anggaran.

Menurut Ira, pembangunan dan perbaikan jalan desa pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah desa yang dibiayai melalui APBDes. Namun, apabila kondisinya benar-benar mendesak, pemerintah desa masih dapat mengusulkan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Malang melalui APBD.

Ia mencontohkan pembangunan jalan poros di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari. Proyek tersebut dapat direalisasikan menggunakan APBD Kabupaten Malang karena dinilai menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

Selain mengandalkan bantuan APBD, menurutnya sejumlah desa mulai mencari sumber pendanaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan. Salah satunya melalui pokok

pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Malang.

Dikatakannya, skema tersebut telah dimanfaatkan Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, untuk mendukung pembiayaan perbaikan jalan desa.

Di sisi lain, DPMD mendorong pemerintah desa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) agar tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

"Desa juga bisa mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) mereka agar tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer," katanya.

Ira mencontohkan Desa Pakisaji yang dinilai mampu memanfaatkan PADes untuk membiayai pembangunan lapangan desa. Penganggaran proyek tersebut dilakukan melalui musyawarah desa dan telah mendapat persetujuan masyarakat.

DPMD berharap diversifikasi sumber pendanaan dapat menjadi jalan keluar bagi pemerintah desa untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah penurunan signifikan alokasi Dana Desa 2026. (Santi/Dya)

Anggaran Hibah Ormas 2026 di Kota Malang 'Disunat' 66%

MALANG - Anggaran hibah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Malang pada 2026 'disunat' sekitar 66,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari yang sebelumnya mencapai Rp2,9 miliar pada 2025, kini tinggal Rp975 juta.

"Kalau di tahun 2026 ini ada Rp975 juta yang dialokasikan untuk hibah ormas. Di 2025 itu Rp2,9 miliar. Penurunan sekitar itu (66 persen). Karena dari Rp2,9 miliar menjadi cuman Rp975 juta," ujar Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Malang, Achmad Sholeh, Minggu (5/7/2026).

Dijelaskannya, penurunan anggaran tersebut berdampak pada besaran bantuan yang diterima masing-masing ormas. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melakukan penyesuaian dengan memangkas nominal hibah bagi setiap penerima. "Nominalnya yang kami kurangi," kata Sholeh.

Selain nominal bantuan yang berkurang, jumlah penerima hibah pada 2026 juga lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebanyak 13 ormas telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Malang sebagai penerima hibah tahun ini, turun dari 17 ormas pada 2025.

Menurut Sholeh, jumlah penerima hibah pada tahun ini sama dengan 2023 dan 2024. Pada masing-masing tahun tersebut, terdapat 13 ormas penerima hibah. Dijelaskannya, pengajuan hibah dilakukan oleh ormas sejak satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan.

Lebih lanjut, Sholeh merinci dari total anggaran Rp975 juta, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp400 juta. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang menerima hibah sebesar Rp200 juta.

Selanjutnya, Muslimat NU Kota Malang, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an (FKPQ), Aisyiyah, dan Ansor masing-masing memperoleh hibah sebesar Rp50 juta.

Sementara Forum Komunikasi Diniyah Takmiliah (FKDT), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII),

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang, Rumah Tahfidz Quran, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), serta Keuskupan Malang masing-masing menerima Rp25 juta.

Sholeh mengatakan, dana hibah tersebut umumnya digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, termasuk berbagai kegiatan pembinaan. Selain itu, dana hibah juga dapat digunakan untuk renovasi bangunan yang dinilai belum representatif.

"Pertama, untuk pemberdayaan masyarakat meliputi pembinaan-pembinaan. Kemudian ada renovasi-renovasi untuk bangunan yang tidak representatif," jelasnya.

Dalam kesempatannya, Sholeh memastikan alokasi hibah ormas pada 2026 tidak dapat bertambah melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).



Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Malang, Achmad Sholeh. (Santi/Lentera)

"Kalau untuk hibah tidak bisa bertambah di PAK," tegasnya.

Sementara untuk tahun anggaran berikutnya, Sholeh menyebut telah ada beberapa ormas yang mengajukan permohonan hibah. Namun, pihaknya masih menunggu kepastian plafon anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Ada beberapa ormas yang sudah mengajukan, tetapi kami masih menunggu plafon dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," pungkasnya. (Santi/Dya)

TRUMP EJEK JUTAAN PELAYAT KHAMENEI DENGAN ANCAMAN 'SATU TEMBAKAN'

Suasana duka yang menyelimuti Teheran dalam prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, justru memicu babak baru perang pernyataan antara Amerika Serikat dan Iran. Ketika jutaan warga Iran memadati ibu kota untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin spiritual mereka, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan komentar yang memancing kontroversi. Ia tidak hanya meragukan ketulusan kesedihan masyarakat Iran, tetapi juga menyampaikan ancaman 'satu tembakan' yang semakin memperuncing ketegangan kedua negara.

Prosesi pemakaman resmi Ali Khamenei akhirnya digelar pada Minggu (5/7/2026), setelah sempat tertunda lebih dari tiga bulan. Penundaan tersebut terjadi

sejak Khamenei tewas dalam serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Upacara penghormatan terakhir itu berlangsung dalam skala sangat besar

dengan jutaan warga memadati kompleks Grand Mosalla di Teheran untuk mengantar kepergian sosok yang selama puluhan tahun menjadi figur sentral Republik Islam Iran.

Di tengah berlangsungnya prosesi tersebut, Trump mengaku mengikuti jalannya pemakaman secara langsung. Dalam wawancara singkat melalui sambungan telepon dengan Axios, Presiden AS itu mengatakan dirinya terkejut melihat besarnya gelombang kesedihan rakyat Iran.

Menurut Trump, selama ini ia beranggapan masyarakat Iran membenci Khamenei. Karena itu, ketika jutaan orang tampak menangis dan memenuhi jalan-jalan Teheran, ia justru mempertanyakan keaslian emosi tersebut.

"Mungkin itu air mata palsu," cetus Trump.

Pernyataan tersebut segera menjadi sorotan karena dianggap sebagai bentuk ejekan terhadap jutaan warga Iran yang sedang berkabung. Namun Trump tidak berhenti sampai di situ.

Dalam pernyataan yang lebih keras, ia bahkan menyinggung kemampuan militer Amerika Serikat untuk menghancurkan seluruh massa yang berkumpul dalam satu serangan udara. Meski demikian, Trump mengklaim langkah tersebut tidak akan dilakukan karena masih membuka peluang bagi proses diplomasi dengan Teheran di masa mendatang.

"Mereka semua ada di sana. Satu tembakan saja, kami bisa menghabiskan mereka semua. Namun, kami tidak akan melakukannya karena nanti kami tidak punya lagi pihak yang bisa diajak bernegosiasi," kata Trump sesumbar.

Ucapan tersebut semakin mempertegas kerasnya retorika Washington terhadap Iran, meskipun pada saat yang sama Trump masih menyebut kemungkinan adanya jalur negosiasi di kemudian hari.

Sementara itu, ribuan bahkan jutaan warga Iran terus memadati kawasan Grand Mosalla sejak Sabtu (4/7/2026). Gelombang manusia berpakaian serba hitam memenuhi jalan-jalan utama Teheran sambil membawa bendera Republik Islam Iran, foto-foto Ali Khamenei, serta potret putranya, Ayatollah Mojtaba Khamenei, yang kini menjadi penerus kepemimpinan tertinggi Iran. (gus,rtr,mee,ist/dya)

Dino Patti Djalal Soroti Absennya Delegasi RI

KEPUTUSAN Pemerintah Indonesia yang tidak mengirimkan delegasi resmi ke prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, memunculkan kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal. Menurut Dino, langkah tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi salah satu prinsip utama diplomasi Indonesia.

Prosesi pemakaman Ali Khamenei berlangsung di Grand Mosalla, Teheran, dan dihadiri oleh puluhan delegasi dari berbagai negara. Kehadiran para tamu asing dipandang tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin tertinggi Iran yang wafat, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan diplomatik masing-masing negara dengan Teheran.

Di tengah kehadiran sejumlah pejabat tinggi dunia, Indonesia memilih diwakili oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Rolliansyah

Soemirat, tanpa mengirimkan delegasi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Keputusan tersebut mendapat sorotan dari Dino Patti Djalal.

Melalui unggahan di media sosial pada Minggu (5/7/2026), mantan diplomat yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri itu mengaku heran dengan sikap pemerintah yang tidak memenuhi undangan resmi dari Iran.

"Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi undangan Iran untuk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yang terbunuh dalam serangan militer ilegal," kata Dino.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Pemerintah Iran telah berupaya mengundang Indonesia untuk menghadiri prosesi penghormatan terakhir tersebut. Namun, menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan Teheran tidak memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan.

"Yang saya dengar, berbagai upaya gigih Iran untuk mengundang Pemerintah Indonesia tidak mendapat tanggapan. Akhirnya, yang hadir hanya Dubes RI di Teheran--yang dianggap oleh Teheran sebagai sikap menyepelekan undangan ini," sambungnya.

Pernyataan itu sekaligus menunjukkan adanya persepsi dari pihak Iran terhadap keputusan Indonesia yang hanya mengirimkan kepala perwakilan diplomatik di Teheran. Menurut Dino, langkah tersebut berbeda dengan sikap banyak negara lain yang mengirimkan utusan resmi dalam berbagai tingkatan sebagai bentuk penghormatan sekaligus menjaga hubungan bilateral. (wid,ini,ist/dya)



Tanpa Mojtaba, tiga putra Ali Khamenei hadir upacara pemakaman di Teheran.ist

Ketika Rhabdomyolysis Mengintai Pelari



Lari marathon kini bukan lagi sekadar olahraga. Bagi banyak orang, berlari puluhan kilometer menjadi simbol pencapaian, tantangan diri, bahkan gaya hidup. Dari lomba 5K, 10K, half marathon hingga marathon penuh, jumlah orang yang mencoba menaklukkan jarak panjang terus bertambah.

Namun, di balik euforia mengejar catatan waktu dan garis finis, tubuh memiliki batas yang tidak boleh diabaikan. Memaksakan diri saat fisik sudah kelelahan bisa membawa risiko serius, salah satunya rhabdomyolysis atau rhabdomyolysis, kondisi ketika otot mengalami kerusakan berat hingga melepaskan kandungannya ke aliran darah.

Rhabdomyolysis terjadi ketika jaringan otot rangka mengalami kerusakan cepat. Saat sel otot pecah, protein bernama mioglobin dan berbagai elektrolit keluar masuk ke dalam aliran darah. Jika jumlahnya berlebihan, mioglobin dapat membebani ginjal karena organ ini harus menyaring zat tersebut.

Dalam kondisi tertentu, rhabdomyolysis dapat berkembang menjadi cedera ginjal akut atau acute kidney injury, yaitu kondisi ketika fungsi ginjal menurun secara tiba-tiba.

Dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi, Tunggul Situmorang, mengingatkan kondisi ini bisa terjadi ketika seseorang tetap memaksakan aktivitas meski tubuh sudah memberikan tanda kelelahan.

"Dia kelelahan akut. Dipaksakan kok itu, dia udah merasa lelah, sudah itu dipaksakan sama dia," ujar Tunggul.

Menurutnya, perubahan kondisi tubuh harus menjadi perhatian, terutama jika mulai muncul tanda gangguan pada urine.

"Acute kidney injury artinya mendadak. Bisa terlihat kencingnya misalnya menjadi, proteinnya banyak kemudian kegelapan warna kencingnya," katanya.

Tunggul menjelaskan warna urine yang berubah berkaitan dengan mioglobin, protein yang berasal dari otot yang mengalami kerusakan.

"Karena memang mioglobin itu, pecahan protein dari otot. Nah, kalau ini cepat ditangani, sebenarnya reversible itu," ujarnya.

Risiko rhabdomyolysis tidak hanya mengintai atlet profesional. Orang yang baru memulai olahraga berat juga dapat mengalami kondisi ini, terutama jika langsung meningkatkan intensitas latihan tanpa persiapan.

Aktivitas fisik ekstrem, dehidrasi, berolahraga di cuaca panas, hingga memaksakan tubuh melewati batas kemampuan menjadi beberapa pemicu yang sering ditemukan.

Selain olahraga berat, rhabdomyolysis juga dapat disebabkan oleh cedera seperti kecelakaan, benturan keras, tekanan berkepanjangan pada otot, sengatan listrik, hingga kondisi medis tertentu.

Ada pula faktor lain seperti infeksi, gangguan metabolisme, konsumsi alkohol berlebihan, maupun efek penggunaan obat tertentu.

Ketika otot rusak, masalah tidak berhenti pada rasa nyeri. Pelepasan zat dari jaringan otot dapat mengganggu keseimbangan tubuh. Salah satunya peningkatan kadar kalium dalam

darah atau hiperkalemia yang berisiko memicu gangguan irama jantung.

Gejala rhabdomyolysis sering kali tidak langsung terasa saat seseorang masih berlari. Dalam beberapa kasus, tanda-tandanya baru muncul beberapa jam hingga beberapa hari setelah aktivitas berat.

Beberapa gejala yang harus diwaspadai antara lain nyeri otot yang tidak biasa, tubuh sangat lelah, kelemahan otot, mual, dehidrasi, berkurangnya frekuensi buang air kecil, hingga urine berwarna lebih gelap seperti kecokelatan.

Urine gelap menjadi salah satu tanda penting karena bisa menunjukkan adanya mioglobin yang keluar melalui ginjal.

Untuk memastikan kondisi tersebut, dokter biasanya melakukan pemeriksaan darah dan urine. Salah satu indikator yang diperiksa adalah kadar creatine kinase (CK), enzim yang meningkat ketika terjadi kerusakan otot.

Pemeriksaan juga dapat melihat kadar mioglobin, elektrolit seperti kalium, serta kreatinin untuk mengetahui kondisi fungsi ginjal.

Penanganan rhabdomyolysis bergantung pada tingkat keparahannya. Pada kasus awal, dokter dapat memberikan cairan infus untuk membantu tubuh membuang mioglobin dan menjaga kerja ginjal.

Namun, jika sudah menyebabkan gangguan ginjal berat, pasien bisa membutuhkan tindakan seperti hemodialisis atau cuci darah.

Pencegahan menjadi langkah paling penting. Pelari disarankan membangun latihan secara bertahap,

menjaga asupan cairan, tidak memaksakan diri saat tubuh sudah kelelahan, serta memperhatikan kondisi lingkungan saat berolahraga.

Sebab, marathon bukan hanya soal siapa yang paling cepat mencapai garis akhir. Bagi tubuh, kemenangan terbesar adalah bisa menyelesaikan perjalanan tanpa mengorbankan kesehatan. (dct/ist/dya)

Tips Aman Lari Marathon Cegah Rhabdomyolysis

1. Latihan Bertahap

- Jangan langsung ikut marathon tanpa persiapan
- Tingkatkan jarak dan intensitas secara perlahan

2. Cukupi Cairan Tubuh

- Minum cukup air sebelum, saat, dan setelah berlari
- Waspadai dehidrasi karena meningkatkan risiko kerusakan otot

3. Kenali Sinyal Tubuh Segera

- kurangi intensitas jika muncul Kelelahan ekstrem
- Nyeri otot tidak biasa

4. Hindari Memaksa Saat

- Tubuh Drop Jangan lanjut berlari ketika tubuh sudah kehabisan tenaga

5. Perhatikan Kondisi Cuaca

- Hindari latihan berat saat suhu terlalu panas

Kacamata Pintar Kolaborasi Kejutan Meta dan **Kylie Jenner**

Industri wearable technology kini tidak lagi sekadar didominasi oleh para pencinta gawai dan efisiensi fungsi. Batas antara fungsionalitas teknologi canggih dan estetika tinggi high-fashion semakin melebur. Langkah paling revolusioner di pertengahan tahun 2026 ini datang dari raksasa teknologi Meta.

Sang pendiri, Mark Zuckerberg, secara resmi mengumumkan kolaborasi teranyar yang cukup mengejutkan publik global dengan menggandeng ikon pop-culture dan pengusaha mode ternama, Kylie Jenner.

Kolaborasi ini menandai babak baru bagi Meta dalam mendekati pasar generasi muda yang dinamis. Jika sebelumnya Meta sukses memadukan desain klasik lewat kolaborasi bersama Ray-Ban Wayfarer, kali ini perusahaan pimpinan Zuckerberg tersebut memilih melangkah lebih berani. Mereka merancang kacamata pintar (smart glasses) sepenuhnya dari nol (designed from scratch), dengan melibatkan intuisi fashion tajam milik Kylie Jenner guna melahirkan gawai yang tidak hanya pintar, tetapi juga menjadi statement item di dunia mode.

Bagi Kylie Jenner, proyek ini melengkapi portofolio bisnisnya yang sangat masif di industri kreatif. Setelah sukses besar mengguncang industri kecantikan lewat Kylie Cosmetics dan meluncurkan lini busana berbahan latex yang berani melalui brand Khy, perempuan berusia 28 tahun ini kini membuktikan bahwa pengaruhnya telah menembus batas-batas industri teknologi digital.

Keterlibatan Kylie Jenner dalam proyek teranyar Meta ini bukan sekadar urusan tempel nama atau strategi pemasaran kosmetik semata. Menurut penjelasan Mark Zuckerberg melalui unggahan resmi di akun Instagram pribadinya, Kylie terjun langsung ke dalam proses kreatif, mulai dari sketsa awal hingga pemilihan detail terkini.

Meta AI yang tertanam di dalam perangkat ini dibalut dengan estetika yang sangat dikurasi untuk memastikan kacamata ini tetap terlihat modis saat dipakai di karpet merah maupun dalam aktivitas sehari-hari.

"Ini adalah lini kacamata pertama yang kami desain dari nol. Ada banyak sentuhan yang ditambahkan sendiri oleh Kylie. Dia adalah ikon fashion, jadi bekerja sama dengannya benar-benar menjadi pengalaman yang menyenangkan," ungkap Mark Zuckerberg.

Koleksi eksklusif ini menghadirkan siluet berbentuk oval yang sedang menjadi tren besar di panggung mode dunia. Dengan menyasar konsumen Gen Z dan Generasi Alpha yang sangat peduli pada estetika visual, kacamata pintar ini hadir sebagai perangkat substitusi yang siap menggeser ketergantungan visual pada smartphone konvensional tanpa mengorbankan gaya personal penggunaanya.

Kacamata pintar hasil kolaborasi Meta dan Kylie Jenner ini dibanderol dengan harga US\$399 atau berkisar di angka Rp 6,5 juta. Di balik tampilannya yang elegan dan minimalis, perangkat wearable ini menyimpan berbagai kecanggihan teknologi Meta AI yang paling mutakhir (ist/dya)

tampilannya yang elegan dan minimalis, perangkat wearable ini menyimpan berbagai kecanggihan teknologi Meta AI yang paling mutakhir (ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Strategi Fashion Interview

Perhatikan Outfit dan Psikologi Warna

Persiapan menghadapi wawancara kerja sering kali menguras energi. Di tengah kesibukan melatih jawaban dan meriset profil perusahaan, ada satu aspek visual yang dampaknya instan namun sering diremehkan yaitu busana yang Anda kenakan.

Banyak pencari kerja menganggap pakaian hanyalah sekadar formalitas pelengkap dokumen. Padahal, dalam hitungan detik pertama saat Anda memasuki ruangan atau menyalakan kamera virtual, outfit Anda telah mengirimkan sinyal kuat mengenai profesionalisme, kesiapan, dan bagaimana Anda menghargai kesempatan tersebut.

Sebuah riset global yang dirilis oleh AiApply menunjukkan data yang cukup mengejutkan mengenai rekrutmen modern. Berdasarkan kompilasi data tersebut, sebanyak 71% perusahaan menyatakan tidak ragu untuk langsung menolak kandidat yang datang dengan pakaian yang dinilai tidak pantas atau salah kostum untuk ukuran industri mereka.

Bahkan, 75% pewawancara mengaku bahwa keputusan untuk tidak meloloskan seorang pelamar sering kali dipengaruhi oleh impresi fisik serta cara berpakaian yang dinilai kurang matang pada menit-menit awal pertemuan.

Melihat fakta tersebut, berpakaian untuk interview bukan lagi soal mengikuti tren fashion atau memakai baju termahal yang Anda miliki. Ini adalah bagian dari strategi komunikasi non-verbal. Memilih pakaian yang tepat menunjukkan bahwa

Anda telah melakukan riset mendalam dan memahami di mana posisi Anda akan ditempatkan.

Prinsip Dress One Step Up

Tantangan terbesar bagi para pencari kerja saat ini adalah batas-batas berpakaian di dunia kerja yang semakin kabur. Sejak gelombang kerja jarak jauh (remote work) dan maraknya kultur perusahaan teknologi (startup) berkembang pesat, standar pakaian kantor sehari-hari bergeser menjadi jauh lebih santai. Kaos polos, celana jin, dan hoodie kini menjadi pemandangan lumrah di berbagai ruang kerja digital.

Namun, laporan panduan karier dari Coursera mengingatkan para kandidat untuk tetap berhati-hati, suasana santai saat bekerja bukan berarti Anda boleh tampil kasual saat diwawancarai.

Dalam dunia rekrutmen profesional, para pakar karier sangat menyarankan penggunaan rumus klasik yang dikenal dengan istilah "Dress One Step Up" (berpakaian satu tingkat di atas standar harian).

Perhatikan pakaian yang biasa digunakan oleh karyawan di perusahaan target Anda secara harian. Jika mereka terbiasa bekerja dengan kaos dan celana denim, maka tingkatkan penampilan Anda satu level di atasnya saat wawancara, misalnya dengan mengenakan celana bahan non-denim (chinos) yang rapi dipadukan dengan kemeja

berkerah yang dimasukkan secara rapi. Jika perusahaan yang Anda tuju bergerak di industri tradisional yang formal seperti perbankan, firma hukum, atau lembaga konsultasi global, standar tertinggi tetap wajib dipatuhi.

Laporan industri dari lembaga penjahit profesional Nathan Tailors menegaskan bahwa untuk sektor-sektor ini, setelan jas lengkap (tailored suit) berwarna gelap atau kemeja formal dengan potongan sleek masih menjadi "seragam wajib" yang menandakan bahwa Anda adalah orang yang serius, terstruktur, dan siap memegang tanggung jawab besar.

Sebaliknya, jika Anda bergerak di industri kreatif seperti agensi periklanan atau media, busana Anda harus bisa menunjukkan karakter serta cita rasa estetika yang tinggi tanpa terlihat berlebihan. Anda bisa memadukan blazer kasual terstruktur dengan pilihan warna yang lebih berani untuk memancarkan aura dinamis.

Selain potongan baju, warna yang Anda pilih memegang peranan psikologis yang sangat kuat.

Biru Navy (Dongker)

Merupakan warna yang paling direkomendasikan di seluruh dunia untuk keperluan wawancara kerja. Berdasarkan survei CareerBuilder, biru mengirimkan sinyal ketenangan, kredibilitas, kejujuran, dan jiwa yang mudah bekerja sama dalam tim.

Putih

Mencerminkan kepribadian yang bersih, terorganisir, transparan, dan sangat berorientasi pada detail. Kemeja putih yang disetrika rapi adalah kanvas terbaik untuk posisi apa pun.

Hitam

Melambungkan kepemimpinan yang kuat, otoritas, dan eksklusivitas. Warna ini sangat disarankan jika Anda melamar untuk posisi tingkat manajerial ke atas. Namun, jika Anda melamar untuk posisi pemula atau menengah, para pakar menyarankan untuk memadukannya dengan warna lain agar tidak memunculkan kesan yang terlalu kaku atau mengintimidasi.

Abu-abu

Memberikan kesan yang sangat logis, analitis, profesional, sekaligus netral. Sangat aman digunakan di berbagai lini industri.

Warna yang Harus Dihindari

Hasil survei menunjukkan bahwa warna Oranye dan Merah Menyala sebaiknya dihindari sebagai warna dominan saat interview kerja tradisional. Oranye sering kali diasosiasikan dengan kesan yang kurang profesional dalam konteks formal, sementara merah yang terlalu dominan dinilai memancarkan aura agresif, mendominasi, dan cenderung keras kepala yang bisa membuat pewawancara merasa kurang nyaman. (ist/d ya)

Membidik Tikus-Tikus ...dari hal 1

PT Pos Indonesia (Persero) tengah menghadapi guncangan hebat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik tertua di Indonesia ini tidak hanya didera anjloknya kinerja keuangan, tetapi juga dihadapkan pada dugaan praktik kecurangan (fraud) internal serta indikasi manipulasi laporan keuangan yang kini sedang diusut tuntas oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 Juni 2025, estimasi kerugian akibat praktik kecurangan pegawai mencapai angka Rp37,72 miliar. Angka ini membengkak dibandingkan posisi akhir 31 Desember 2024 yang tercatat minimal Rp34,48 miliar. Manajemen Pos Indonesia mengonfirmasi adanya keretakan tata kelola ini dalam laporan resminya.

"Grup memiliki potensi kerugian yang cukup signifikan disebabkan oleh praktik kecurangan pegawai," tulis manajemen Pos Indonesia dalam laporan keuangan yang dikutip Minggu (5/7/2026).

Praktik kecurangan ini tersebar luas di berbagai wilayah operasional perseroan sepanjang semester I-2025. Regional 6 Makassar menyumbang kerugian terbesar senilai Rp18,71 miliar, disusul oleh Regional 1 Medan yang mencatatkan kerugian Rp9,52 miliar, dan Regional 3 Bandung sebesar Rp5,69 miliar.

Sementara itu, akumulasi kerugian dari Regional 2 Jakarta, Regional 4 Semarang, Regional 5 Surabaya, dan Regional Head Office (HO) mencapai keseluruhan sekitar Rp4 miliar. Kebocoran dana ini juga merembet ke entitas anak perusahaan, di mana PT Pos Logistik Indonesia mencatat rugi akibat kecurangan sebesar Rp433,8 juta dan PT Pos Finansial Indonesia menderita rugi sebesar Rp216,58 juta.

Pihak manajemen menerangkan bahwa kasus-kasus lancung tersebut saat ini belum final dan masih dalam penanganan hukum oleh pihak berwajib. "Sampai saat ini beberapa kasus masih dalam tahap pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh pihak penyidik," sebut manajemen dalam laporan keuangan.

Seiring dengan terbongkarnya praktik kecurangan, kinerja fundamental keuangan PT Pos Indonesia sepanjang paruh pertama 2025 ikut runtuk. Pendapatan perusahaan ambruk ke level Rp1,8 triliun per 30 Juni 2025, turun tajam dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,74 triliun. Kondisi ini membuat laba tahun berjalan anjlok menjadi Rp117,8 miliar, menyusut lebih dari separuh dari raihan semester I-2024 yang sebesar

Rp248,52 miliar.

Di sisi lain, meskipun PT Pos Indonesia dapat menekan beban pokok layanan ke level Rp1,18 triliun, laba kotor yang tersisa hanya sebesar Rp623,92 miliar, ambles hampir setengah dari posisi laba kotor tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,06 triliun.

Kondisi likuiditas perusahaan juga kian mengkhawatirkan setelah aktivitas operasi perusahaan mencatat arus kas negatif alias defisit sebesar Rp677,52 miliar, berbanding terbalik dengan posisi Juni 2024 yang surplus hingga Rp974,77 miliar.

Di sisi neraca, PT Pos Indonesia mencatat total liabilitas atau utang mencapai Rp9,89 triliun per Juni 2025, melonjak 31,72% dari posisi liabilitas di akhir tahun 2024 sebesar Rp7,51 triliun.

Kenaikan beban utang yang masif ini ikut mengerek nilai aset perseroan secara semu ke level Rp18,91 triliun, naik 14,48% dari posisi aset tahun sebelumnya sekitar Rp16,46 triliun.

Mundurinya Dirut dan Temuan Investigasi

Sengkarut ini kian memanas setelah Daud Joseph secara mengejutkan mengundurkan diri dari kursi Direktur Utama PT Pos Indonesia pada Kamis (2/7/2026), padahal ia baru menjabat sekitar tiga bulan sejak diangkat pada 11 Maret 2026. Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Iwan Gunawan, menyebutkan, "Alasan pengunduran diri adalah murni dari keinginan dan pertimbangan pribadi yang bersangkutan."

Namun, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas, membeberkan bahwa mundurnya Joseph berkaitan erat dengan kompleksitas masalah akut di tubuh PT Pos Indonesia yang ditemukan selama proses due diligence (uji tuntas).

Menurut Rohan, berdasarkan hasil asesmen, Joseph menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan revamp yang menyeluruh dan fundamental karena kerumitan restrukturisasi ke depan membutuhkan keahlian yang lebih spesifik.

Dari evaluasi mendalam tersebut, Danantara justru mengendus adanya rekayasa pembukuan yang sistemik.

"PT Pos Indonesia saat ini memang sedang kami benahi secara menyeluruh. Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Kami juga menerima laporan serta menemukan indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini

sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Rohan Hafas dalam keterangan tertulisnya.

Rohan memastikan bahwa Danantara tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk praktik lancung yang merusak tata kelola perusahaan milik negara. "Satu per satu persoalan yang selama ini membebani perusahaan harus kami bereskan. Tidak ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum," tambahnya.

Dipicu Kehilangan Proyek Pemerintah

Sebelum meletakkan jabatannya, Daud Joseph sempat blak-blakan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan pada Senin (22/6/2026). Ia mengakui pendapatan usaha PT Pos sepanjang tahun 2025 secara keseluruhan (berdasarkan laporan unaudited) anjlok 20% menjadi Rp3,9 triliun dari target Rp6,2 triliun, atau hanya tercapai 63%.

Hal itu membuat EBITDA atau net income jauh dari target Rp800 miliar dan hanya terealisasi sebesar Rp300 miliar. Penurunan paling telak terjadi pada lini bisnis logistik yang melosor dari Rp2 triliun menjadi hanya Rp600 miliar.

Joseph mengungkapkan, selama lima tahun terakhir (2020-2025), kinerja keuangan PT Pos tampak "hijau" dan meroket--bahkan sempat menyentuh pendapatan Rp5,4 triliun pada 2020--karena ditopang penuh oleh proyek distribusi bansos dan pangan dari pemerintah.

"Kontribusi dari bantuan proyek pemerintah, baik itu bansos, baik itu bantuan beras, bantuan pangan, yang disalurkan kepada warga masyarakat, mendukung dan membantu revenue Pos Indonesia," ungkap Joseph di depan anggota dewan.

Namun, ketergantungan yang tinggi ini menjadi bumerang ketika program tersebut berakhir. "Ini terlihat ketika di tahun 2025, bantuan proyek pemerintah turun ke angka Rp300 miliar, revenue totalnya langsung turun drastis, hanya ke angka Rp3,9 triliun," tambah Joseph.

Ketika proyek pemerintah disetop, PT Pos langsung kedodoran karena kehilangan ceruk layanan andalan dan belum mampu mengoptimalkan potensi inti bisnis (core business) mereka sendiri di bidang logistik, jasa keuangan, kurir, maupun properti.

DPR RI Desak Audit Semua BUMN

Merespons mega-skandal dan salah kelola di PT Pos Indonesia, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengapresiasi langkah tegas Danantara, namun mendesak agar

evaluasi serupa tidak berhenti di satu perusahaan saja melainkan diterapkan kepada seluruh perusahaan pelat merah.

"Proses evaluasi seperti ini merupakan langkah yang tepat dan perlu terus diperkuat," kata Firnando dalam keterangan persnya, Minggu (5/7/2026).

Firnando berharap pendekatan serupa menjadi titik awal perbaikan sistem yang lebih menyeluruh di lingkungan BUMN di tengah agenda streamlining (penataan) oleh pemerintah. Menurutnya, penguatan sistem pengawasan menjadi aspek yang sangat krusial agar setiap perusahaan negara memiliki tata kelola yang bersih dan sehat. (wid,ist,ini,rls/dya)

Empat Titik Rawan

Korupsi BUMN

1. Direksi & Komisaris

- Penempatan berbasis kedekatan politik.
- Kompetensi sering diabaikan.

2. Anak & Cucu Perusahaan

- Sulit diawasi.
- Transaksi makin kompleks.
- Potensi konflik kepentingan.

3. Pengadaan

- Vendor titipan.
- Mark up.
- Penunjukan langsung.
- Rekayasa tender

4. Investasi

- Investasi saham.
- Reksa dana.
- Kerja sama bisnis.
- Penjualan aset.

Contoh Kasus



Jiwassraya:

Investasi berisiko tinggi, rugikan negara Rp16,8 triliun.



ASABRI:

Investasi tidak prudent, rugikan negara Rp22,7 triliun.



Garuda Indonesia:

Dugaan korupsi pengadaan dan sewa pesawat bernilai triliun rupiah.



Tata Niaga Timah:

Penyimpangan tata niaga dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.



MISTERI AMPLOP DARI BUPATI KUANSING, KPK BAKAL PANGGIL MENHUT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni guna mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Kasus ini berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 3.800 hektare di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Mencuat kabar mengenai 'amplop misterius' yang diduga ditinggalkan Suhardiman Amby di ruang kerja Menhut saat melakukan audiensi kedinasan pada awal Juni lalu.

Kepastian pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/7/2026) menjelang pergantian hari.

Langkah ini diambil setelah mencuatnya kabar mengenai "amplop misterius" yang diduga ditinggalkan oleh Bupati Suhardiman Amby di ruang kerja Menhut saat melakukan audiensi kedinasan pada awal Juni lalu.

Menanggapi konferensi pers klarifikasi yang sempat digelar oleh Raja Juli Antoni secara terpisah, KPK menyatakan tidak mempersoalkannya. Namun, lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa agenda pemeriksaan menteri bersangkutan berjalan independen demi kepentingan hukum.

"Kemudian tadi ada pihak-pihak lain yang atau pihak di luar KPK yang



kemudian melakukan konferensi pers untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang kita temukan. Ya, silakan saja karena itu memang hak mereka untuk menyampaikan. Tetapi kami mohon diberi waktu terlebih dahulu karena tim penyidik sedang bekerja," ujar

Taufik, dikutip Minggu (5/7/2026).

Taufik menambahkan, keterangan dari kementerian terkait sangat krusial untuk memetakan dugaan aliran dana serta kelayakan prosedur pengajuan lahan. Namanya dipastikan masuk dalam daftar saksi penyidik.

DAFTAR KEPALA DAERAH YANG TERJARING OTT KPK

-  Wali Kota Madiun Maidi
-  Bupati Pati Sudewo
-  Bupati Pekalongan Fadia Arafik
-  Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari
-  Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman
-  Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
-  Bupati Muara Enim Edison
-  Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby
-  Bupati Langkat Syah Afandin

KPK Evaluasi Mekanisme OTT Usai Dugaan Kebocoran di Kuansing dan Langkat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) menyusul dugaan bocornya informasi saat penindakan terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dan Bupati Langkat, Syah Afandin. Dua operasi senyap yang berlangsung berurutan dalam sepekan itu memunculkan indikasi bahwa keberadaan tim penyidik telah diketahui pihak luar sebelum tindakan dilakukan.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan evaluasi akan difokuskan pada pola kerja tim di lapangan, termasuk kemungkinan mengubah mekanisme pergerakan personel agar potensi kebocoran informasi dapat diminimalkan.

"Jadi, itu masih perlu dilakukan pendalaman-pendalaman lagi oleh tim KPK, apakah nanti kami juga akan lakukan evaluasi apakah pada saat

mungkin turun ke lapangan itu tidak bersama-sama atau berombongan, satu per satu, untuk menghindari bocor dari dalam, tetapi itu diduga oleh pihak dari luar sehingga kemudian informasi sampai ke pihak-pihak yang menjadi target kami," ujar Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers, Sabtu (4/7/2026) dinihari.

Menurut Achmad, penyelidikan yang bersifat tertutup pada prinsipnya tidak semestinya diketahui oleh pihak di luar KPK. Kondisi tersebut berbeda dengan penyelidikan terbuka yang memang melibatkan pemeriksaan sejumlah pihak sehingga peluang tersebarnya informasi menjadi lebih besar.

Ia mengakui, ketika tim turun ke lapangan terdapat kemungkinan identitas petugas dikenali masyarakat atau pihak tertentu.

"Nah ketika turun ke lapangan itulah ada mungkin indikasi-indikasi diketahui karena memang mungkin

orangnya sudah pernah datang ke Langkat atau memang ada informasi-informasi yang diketahui ini orang-orang KPK," tuturnya.

Meski demikian, KPK belum menyimpulkan bahwa kebocoran benar-benar berasal dari internal lembaga antirasuah. Dugaan sementara justru mengarah pada kemungkinan pihak luar mengenali aktivitas tim penyidik.

"Jadi ini belum pasti bocor dari luar, tapi memang ini dugaan-dugaan saja bahwa orang itu mungkin juga mengira-ngira bahwa ada tim KPK yang turun ke daerah," sambungnya.

Achmad menegaskan, dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani bukanlah peristiwa yang terjadi secara spontan, melainkan telah berlangsung dan direncanakan sejak awal. Karena itu, setiap tindak pidana selalu meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri penyidik. (wid,ist/dya)

"Apakah memang dibutuhkan keterangan-keterangan yang bersangkutan, ya, tentunya kita akan lakukan pemanggilan. Tetapi ini murni adalah kebutuhan penyidikan, bukan karena ada konferensi pers atau dari pihak lain," tegas Taufik.

"Jadi fakta-fakta, bukan hanya, bukan karena komentar-komentar, tapi karena betul-betul murni kebutuhan penyidikan, baik itu dari keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa, maupun dari dokumen-dokumen hasil penggeledahan, hasil penyitaan, seperti itu."

Konstruksi perkara ini bermula dari pertemuan formal antara Pemkab Kuansing dan pihak Kementerian Kehutanan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2026. Dalam audiensi itu, Bupati Suhardiman Amby beserta jajarannya menyerahkan rekomendasi pelepasan 3.800 hektare kawasan HPT agar dapat dimasukkan ke dalam program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Secara regulasi, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan terbatas untuk memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang daerah. Sementara itu, wewenang absolut untuk mengeksekusi dan melegalkan status pelepasan kawasan hutan berada penuh di tangan kementerian dalam hal ini Menhut. (wid,rls/dya)